



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dan mewujudkan perlindungan terhadap keamanan arsip serta untuk melaksanakan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;



- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. [Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015](#) tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
4. [Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Arsip Konvensional adalah Arsip yang informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan.
4. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
5. Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip aktif sebagai berkas kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lingkungannya.
6. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
7. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan tingkat seriousness dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
8. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
9. Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
10. Biasa/Terbuka (B/T) adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.



11. Terbatas (T) adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
12. Rahasia (R) adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
13. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
14. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari luar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimaksudkan untuk:
 - a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar Arsip aktif;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang



tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertujuan untuk:
- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. menyediakan informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dikategorikan Biasa/Terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya oleh Publik;
 - d. menjamin keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
 - e. menciptakan kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 3

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis;
- b. pengelola Arsip;
- c. pengamanan Arsip; dan
- d. pengguna Arsip.

Pasal 4

(1) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. klasifikasi Arsip;
- b. Jenis Arsip;
- c. klasifikasi keamanan;
- d. hak akses;



- e. dasar pertimbangan; dan
 - f. Unit Pengolah.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan tingkat paling rendah dari pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip Dinamis.
 - (3) Klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 5

- (1) Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. pejabat fungsional arsiparis; dan/atau
 - b. pengelola Arsip non arsiparis.
- (2) Pengelola Arsip non arsiparis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai yang memiliki kemampuan substansi kearsipan.

Pasal 6

- (1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. sarana; dan
 - b. pengamanan ruang simpan.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perangkat keras (*hardware*); dan
 - b. perangkat lunak (*software*).
- (3) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip Konvensional berupa *filing cabinet* atau rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas serta brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia;



- b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, Arsip inaktif, Arsip terjaga, dan Arsip vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan Arsip inaktif.

Pasal 7

Pengamanan ruang simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pemasangan kamera pengawas (CCTV);
- b. kunci pengamanan ruangan;
- c. media simpan Arsip; dan
- d. tempat penyimpanan Arsip.

Pasal 8

Pengguna Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Pengguna Internal; dan
- b. Pengguna Eksternal.

Pasal 9

(1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Menteri Koordinator;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I meliputi Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I Staf Ahli;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II dan Pejabat Administrator/Eselon III; dan



- e. Pejabat Pengawas/Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana; dan
 - f. Pengawas internal.
- (2) Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya.
 - (3) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengakses Arsip di bawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan pimpinan unit kerja lainnya yang setingkat/sederajat, kecuali telah mendapatkan izin.
 - (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengakses seluruh Arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi pada unit kerja terkait.
 - (5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II dan Pejabat Administrator/Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan tingkat lebih tinggi dan pimpinan unit kerja lainnya yang setingkat/sederajat, kecuali telah mendapatkan izin.
 - (6) Pejabat Pengawas/Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka.
 - (7) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10

- (1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. pengawas eksternal;
 - b. aparat penegak hukum; dan
 - c. Publik.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- (4) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 11

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2019

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1089

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,



Sidiq Mustofa



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

A. ARSIP DINAMIS FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI ARSIP		JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	PR		PERENCANAAN				
	PR	00	Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan				
	PR	00	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) / <i>Master Plan</i>	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR	00	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi

	PR	00	02	Rencana Strategis (Renstra)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR	00	03	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR	01		Perencanaan Kinerja dan Anggaran				
	PR	01	00	Penyiapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR	01	01	Rencana Kerja Tahunan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR	01	02	Inisiatif Baru	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR	02		Penetapan Kinerja	Terbatas	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR	03		Revisi Dokumen Anggaran				
	PR	03	00	Revisi DIPA dan POK	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR	03	01	Anggaran Belanja Tambahan (ABT)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi

		02	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
2	EP		EVALUASI DAN PELAPORAN				
	EP	00	Pemantauan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	EP	01	Evaluasi Program				
	EP	01	Evaluasi Program Unit Kerja	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	EP	01	Evaluasi Program Kemenko Polhukam	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	EP	02	Laporan				
	EP	02	Laporan Berkala	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	EP	02	Laporan Khusus/Laporan Insidental	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	EP	02	Laporan Perkembangan (<i>Progress Report</i>)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi

	EP	02	03	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
3	OT			ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
	OT	00		Penataan Organisasi				
	OT	00	00	Analisis Organisasi/Kelembagaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT	00	01	Penyempurnaan Organisasi/Kelembagaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT	01		Penataan Instrumen Jabatan				
	OT	01	00	Analisis Jabatan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT	01	01	Analisis Beban Kerja	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT	01	02	Standar Kompetensi Jabatan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT	01	03	Peta Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi

	OT	01	04	Evaluasi Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT	02		Penataan Tata Laksana				
	OT	02	00	Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT	02	01	Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT	02	02	Monitoring dan Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT	02	03	Penyusunan dan Penyempurnaan Instrumen atau Pedoman Ketatalaksanaan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT	03		Manajemen Reformasi Birokrasi	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
4	DI			DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI				
	DI	00		Pengelolaan Data	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	DI	01		Teknologi Informasi				
	DI	01	00	Rencana strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	DI	01	01	Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi

	DI	01	02	Perekaman dan Pemutakhiran Data	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	DI	01	03	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	DI	01	04	Dokumen Hosting	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	DI	01	05	Layanan <i>Back Up</i> Data Digital	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
5	PS			PERPUSTAKAAN				
	PS	00		Pengadaan Bahan Pustaka				
	PS	00	00	Pembelian Bahan Pustaka	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PS	00	01	Hibah	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PS	00	02	Sumbangan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PS	00	03	Kejasama	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PS	01		Pengelolaan Bahan Bacaan				
	PS	01	00	Inventarisasi	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi

	PS	01	01	Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PS	01	02	Stock Opname	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PS	01	03	Penyiangan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PS	02		Pelayanan Perpustakaan				
	PS	02	00	Sirkulasi Bahan Pustaka	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PS	02	01	Keanggotaan Perpustakaan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Perencanaan dan Organisasi
6	PH			PRODUK HUKUM				
	PH	00		Penyusunan Produk hukum yang bersifat Pengaturan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	PH	01		Penyusunan Produk Hukum yang Bersifat Penetapan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam"	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	PH	02		Dokumentasi Produk Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam"	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	PH	03		Publikasi Produk Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan

	PH	04		Telaah Produk Hukum/Perjanjian/Akta	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	PH	05		Pemberian pertimbangan dan Advokasi Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
7	SD			PERSIDANGAN				
	SD	00		Rapat Koordinasi Tingkat Menteri				
	SD	00	00	Rapat Paripurna Tingkat Menteri	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	SD	00	01	Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor Tingkat Menteri)	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	SD	00	02	Rapat Menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	SD	01		Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	SD	02		Rapat Internal Staf (RIS)				
	SD	02	00	Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	SD	02	01	Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan

	HM	03	04	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	HM	03	05	Pendapat Umum	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	HM	04		Tanda Penghargaan, Kenang-kenangan dan Ucapan				
	HM	04	00	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
	HM	04	01	Ucapan duka/terima kasih/permohonan maaf	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
9	TU			KETATAUSAHAAN				
	TU	00		Persuratan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	TU	00	00	Pengurusan Surat Masuk	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	TU	00	01	Pengurusan Surat Keluar	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	TU	01		Kearsipan				
	TU	01	00	Penyusunan Sistem	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	TU	01	01	Pengelolaan Arsip Aktif	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum

	TU	01	02	Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	TU	01	02	Penyimpanan dan pemeliharaan arsip (Daftar arsip, Daftar pencarian arsip, Daftar arsip informasi publik, Daftar arsip vital/aset)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	TU	01	02	Penyusutan Arsip	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
				Pemindahan Arsip Inaktif (Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang Dipindahkan)				
				Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna (Berita Acara Pemusnahan, Daftar Arsip yang Dimusnahkan, Persetujuan Pemusnahan oleh Kepala ANRI, Keputusan Pemusnahan)				
				Penyerahan Arsip Statis (Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang Diserahkan)				
	TU	01	03	Pembinaan dan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	TU	02		Monitoring dan Evaluasi Sitem Kearsipan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	TU	03		Keprotokolan				
	TU	03	00	Upacara/Acara Kedinasan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	TU	03	01	Agenda Pimpinan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum

	TU	03	02	Kunjungan Dalam Negeri	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	TU	03	03	Kunjungan Luar Negeri	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	TU	03	04	Sambutan/Pidato	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
10	KP			KEPEGAWAIAN				
	KP	00		Bezzeting / Persediaan Pegawai	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	01		Formasi Pegawai				
	KP	01	00	Penyusunan Usulan Formasi Pegawai	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	01	01	Pengajuan Usulan Formasi	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	01	02	Penetapan Formasi Khusus	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	02		Pengadaan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil				
	KP	02	00	Penerimaan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	02	01	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum

	KP	01	- Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP (Surat Lamaran, Ijazah, SKCK, Kartu Kuning, Surat Kesehatan)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	02	- Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	02	Orientasi CPNS	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	03	Prajabatan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	04	Penempatan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	02	Pengangkatan CPNS	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	03	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	04	Pengangkatan dan Pemberhentian				
	KP	04	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	04	Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional tertentu	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	04	Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Umum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum

	KP	04	03	Alih Tugas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	04	04	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	05		Pendelegasian Wewenang (Plt/Plh)				
	KP	05	00	Pelaksana Tugas (Plt)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	05	01	Pelaksana Harian (Plh)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	06		Kenaikan Pangkat/Golongan				
	KP	06	00	Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil organik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	06	01	Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil yang di pekerjaan di Kementerian Kemenko Polhukam	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	06	02	Kenaikan Pangkat Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	06	03	Kenaikan Pangkat, Golongan dan Jenjang Jabatan Fungsional tertentu	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP		07	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	08		Pembinaan Karier Pegawai				

	KP	08	00	Kompetensi Pegawai		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	08	01	Pemetaan/ <i>talent mapping</i> pegawai		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	08	02	Ujian Penyesuaian Ijazah		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	08	03	Ujian Dinas		Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	08	04	Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan		Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	08	05	Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional/Kursus		Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	08	06	Tugas Belajar		Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	08	07	Izin Belajar		Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	08	08	Prestasi Kerja Pegawai		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	08	09	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum

	KP	08	10	Disiplin Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	09		Administrasi Pegawai				
	KP	09	00	Data/Keterangan Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	09	01	Kartu Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	09	02	Kartu Istri/Kartu Suami	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	09	03	Penyesuaian Masa Kerja	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	09	04	Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	09	05	Mutasi Keluarga	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	09	06	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	09	07	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum

KP	09	07	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil		Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum
			Berkas perseorangan TNI/POLRI yang dipekerjakan					
			Berkas perseorangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan tenaga perbantuan (PPNPN)					
			Berkas Perseorangan Menteri dan Wakil Menteri					
			Berkas Perseorangan Staf Khusus Menteri					
	KP	10	Kesejahteraan Pegawai					
	KP	10	Penghargaan dan Tanda Jasa		Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	10	Cuti		Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	10	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai		Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	10	Tabungan Pensiun (Taspen)		Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	10	Tabungan Perumahan (Bapetarum)		Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	10	Bantuan Sosial		Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum

	KP	10	06	Konsultasi dan Pembinaan Mental Pegawai	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	10	07	Olahraga/Kesenian/Rekreasi	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	10	08	Koperasi	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	10	09	Fasilitas Pegawai	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	11		Pemberhentian Pegawai				
	KP	11	00	Dengan Hormat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	11	01	Tidak Dengan Hormat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	11	02	Pensiun	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	11	03	Pemberhentian Sementara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	12		Korps Pegawai Republik Indonesia	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	13		Dharma Wanita	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum

	KP	14	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	KP	15	Pengarusamaan Gender	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
11	PL		PERLENGKAPAN				
	PL	00	Perencanaan Kebutuhan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	01	Pengadaan Barang dan Jasa				
	PL	01 00	Pengadaan Barang	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	01 01	Pengadaan Jasa Lainnya	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	01 02	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	01 03	Pengadaan Jasa Konsultasi	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	01 04	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	02	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)				

	PL	02	00	Pejabat Pengguna BMN	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	02	01	Pergudangan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	02	02	Penggunaan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	02	03	Pemanfaatan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	02	04	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	02	05	Penilaian	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	02	06	Pemindahtanganan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	02	07	Pemusnahan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	02	08	Penghapusan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	03		Penatausahaan Barang Milik Negara				
	PL	03	00	Pembukaan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum

	PL	03	01	Inventarisasi Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	03	02	Laporan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	03	02	Dokumen kepemilikan aset/ kekayaan Arsip Nasional Republik Indonesia (sertifikat tanah, IMB, BPKB, STNK, Blueprint dan Lain-lain)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Biro Umum
	PL	04		Pengawasan dan Pengendalian	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
12	RT			RUMAH TANGGA				
	RT	00		Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				
	RT	00	00	Gedung dan Bangunan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	RT	00	01	Kendaraan Dinas	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	RT	00	02	Instalasi/jaringan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	RT	01		Keamanan dan Ketertiban	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum

	RT	02		Pelayanan Rapat dan Urusan Dalam	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
	RT	03		Pertamanan dan Kebersihan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Biro Umum
13	KU			ADMINISTRASI KEUANGAN				
	KU	00		Pelaksanaan Anggaran				
	KU	00	00	Pejabat Pengelola Keuangan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	00	.01	Pendapatan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	00	02	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	00	03	Pengeluaran Anggaran/ Belanja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	00	04	Penggajian dan Tunjangan	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Keuangan
	KU	00	05	Tunjangan Kinerja dan Uang Makan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	01		Pengelolaan Perbendaharaan				

	KU	01	00	Pajak	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	01	01	Pembukuan Anggaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	01	02	Rekening Pemerintah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	01	03	Verifikasi Anggaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	01	04	Pinjaman/Bantuan/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	02		Ketatausahaan Keuangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	03		Laporan Keuangan				
	KU	03	00	Laporan Keuangan Bulanan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	03	01	Laporan Keuangan Triwulan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	03	02	Laporan Keuangan Semesteran	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	03	03	Laporan Keuangan Tahunan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan

	KU	03	04	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
				Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	04		Pertanggungjawaban Keuangan Negara				
	KU	04	00	Laporan Hasil Pemeriksaan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
	KU	04	01	Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Bagian Keuangan
14	PW			PENGAWASAN				
	PW	00		Perencanaan Kebijakan Pengawasan				
	PW	00	00	Perencanaan Pengawasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	00	01	Kerjasama Pengawasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	01		Audit/Pemeriksaan				
	PW	01	00	Audit Kinerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	01	01	Audit dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Khusus	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat

	PW	01	02	<i>Probity Audit</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	02		Reviu				
	PW	02	00	Reviu Laporan Keuangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	02	01	Reviu RKA-KL/Revisi RKA-KL	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	02	02	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	02	03	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	02	04	Reviu LAKIP Kemenko Polhukam	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	03		Evaluasi				
	PW	03	00	Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	03	01	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	03	02	Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat

	PW	03	03	Evaluasi Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	03	04	Evaluasi Penilaian Zona Integritas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	04		Pemantuan				
	PW	04	00	Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Internal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	04	01	Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Intern	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	04	02	Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	05		Konsultan				
	PW	05	00	Pedoman Pengawasan Internal	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	05	01	Pembinaan Komitmen Anti Korupsi	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	05	02	<i>Whistleblowing System</i>	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	05	03	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat

	PW	05	04	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	05	05	Pengelola Gratifikasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Inspektorat
	PW	05	06	Forum Pengawasan	Biasa	Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Inspektorat
B. ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF								
1	DN			POLITIK DALAM NEGERI				
	DN	00		Penyusunan Kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Koordinasi Bidang Politik, Dalam Negeri
	DN	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan				
	DN	00	00	Kelembagaan Demokrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Koordinasi Bidang Politik, Dalam Negeri
	DN	00	01	Desentralisasi dan Otonomi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Koordinasi Bidang Politik, Dalam Negeri
	DN	00	02	Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Koordinasi Bidang Politik, Dalam Negeri
	DN	00	03	Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Koordinasi Bidang Politik, Dalam Negeri

	DN	01		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputyi Koordinasi Bidang Politik, Dalam Negeri
	DN	02		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan				
	DN	02	00	Kelembagaan Demokrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputyi Koordinasi Bidang Politik, Dalam Negeri
	DN	02	01	Desentralisasi dan Otonomi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputyi Koordinasi Bidang Politik, Dalam Negeri
	DN	02	02	Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputyi Koordinasi Bidang Politik, Dalam Negeri
	DN	02	03	Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputyi Koordinasi Bidang Politik, Dalam Negeri
2	LN			POLITIK LUAR NEGERI				
	LN	00		Penyusunan Kebijakan di bidang Politik Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputyi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
	LN	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan				
	LN	00	00	Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputyi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
	LN	00	01	Kerja Sama Amerika dan Eropa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputyi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

	LN	00	02	Kerja Sama Association of South East Asia Nations (ASEAN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
	LN	00	03	Kerja Sama Organisasi Internasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
	LN	01		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
	LN	02		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan				
	LN	02	00	Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
	LN	02	01	Kerja Sama Amerika dan Eropa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
	LN	02	02	Kerja Sama ASEAN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
	LN	02	03	Kerja Sama Organisasi Internasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
3	HK			HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA				
	HK	00		Penyusunan Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terbatas	Eselon II	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
	HK	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan				

	HK	00	00	Materi Hukum	Terbatas	Eselon II	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
	HK	00	01	Penegakan Hukum	Terbatas	Eselon II	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
	HK	00	02	Hukum Internasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
	HK	00	03	Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	Terbatas	Eselon II	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
	HK	01		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Terbatas	Eselon II	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
	HK	02		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan				
	HK	02	00	Materi Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
	HK	02	01	Penegakan Hukum	Terbatas	Eselon II	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
	HK	02	02	Hukum Internasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

	HK	02	03	Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	Terbatas	Eselon II	Tidak memiliki dampak terhadap tugas dan fungsi di Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
4	HN			PERTAHANAN NEGARA				
	HN	00		Penyusunan Kebijakan di Bidang Pertahanan Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
	HN	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan				
	HN	00	00	Doktrin dan Strategi Pertahanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
	HN	00	01	Intelijen Pertahanan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
	HN	00	02	Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
	HN	00	03	Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
	HN	01		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
	HN	02		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan				
	HN	02	00	Doktrin dan Strategi Pertahanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

	HN	02	01	Intelijen Pertahanan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
	HN	02	02	Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
	HN	02	03	Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
5	KM			KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
	KM	00		Penyusunan Kebijakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban Nasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	KM	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan				
	KM	00	00	Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	KM	00	01	Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	KM	00	02	Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	KM	00	03	Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

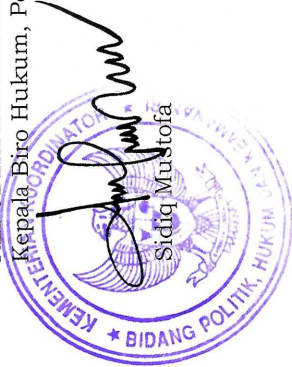
	KM	01		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	KM	02		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan				
	KM	02	00	Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	KM	02	01	Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	KM	02	02	Penanganan kejahatan Transnasional dan kejahatan Luar Biasa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	KM	02	03	Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
6	KB			KESATUAN BANGSA				
	KB	00		Penyusunan Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
	KB	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan				
	KB	00	00	Wawasan Kebangsaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
	KB	00	01	Memperteguh Ke-Bhinneka-an	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

	KB	00	02	Kewaspadaan Nasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
	KB	00	03	Kesadaran Bela Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
	KB	01		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
	KB	02		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan				
	KB	02	00	Wawasan Kebangsaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
	KB	02	01	Memperteguh Ke-Bhinneka-an	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
	KB	02	02	Kewaspadaan Nasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
	KB	02	03	Kesadaran Bela Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
7	KI			KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
	KI	00		Penyusunan Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
	KI	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan				
	KI	00	00	Informasi Publik dan Media Massa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

	KI	00	01	Telekomunikasi dan Informatika	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
	KI	01		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
	KI	02		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan				
	KI	02	00	Informasi Publik dan Media Massa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
	KI	02	01	Telekomunikasi dan Informatika	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
8	AP			APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL				
	AP	00		Penyusunan Kebijakan di Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
	AP	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan				
	AP	00	00	Tata Kelola Pemerintahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
	AP	00	01	Peningkatan Pelayanan Publik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

	AP	01		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
	AP	02		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan				
	AP	02	00	Tata Kelola Pemerintahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
	AP	02	01	Peningkatan Pelayanan Publik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
9	RK			REKOMENDASI KEAHLIAN				
	RK	00		Rekomendasi Isu-Isu Strategis	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam	Staf Ahli

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan.



Sidiq Mustofa

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIRANTO